

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kinerja merupakan hasil pencapaian secara nyata dalam periode tertentu baik secara individu ataupun secara kelompok. Kinerja aparatur pemerintah desa adalah satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Menurut bapak Beweni, S.STP., M.IP selaku kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa kabupaten Barito Timur memperoleh predikat “C” dalam penilaian tersebut tentunya masih terdapat dan permasalahan yang dihadapi. Salah satunya adalah target kinerja yang belum tercapai dengan semestinya, yaitu terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dengan indikator kinerja yang belum tercapai di bidang pelayanan publik.

Selain itu kinerja aparatur pemerintah masih memerlukan pengawasan karena dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih terlihat adanya keluhan dari masyarakat yang diberikan oleh perangkat desa. Perangkat desa terkadang berangkat ke kantor pada siang hari menjelang istirahat dan tidak sesuai dengan jam operasional kantor yang telah ditetapkan, kurang disiplinnya para aparatur pada waktu mengakibatkan habatan yang mempersulit masyarakat dalam mengurus kepentingannya. Adanya ketidakselarasan antara aturan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa sehingga kinerja aparatur pemerintah dinilai buruk.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah desa yang baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat

penting karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian organisasi.

Menurut Arsyati *at al* (2018), menunjukkan bila sekelompok karyawan dan atasannya mempunyai kinerja yang baik, maka akan berdampak pada kinerja organisasi pula, dimana kualitas sumber daya manusia sangat menentukan dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi dengan peningkatan kinerja yang sangat diharapkan. Lebih lanjut menurut Arsyati *at al* (2018), “ peran manusia dalam anggaran sangat besar karena seluruh tahapan anggaran melibatkan manusia, anggaran sangat besar karena seluruh tahapan anggaran melibatkan manusia anggaran dibuat oleh manusia, diperbaiki oleh manusia dan pencapaiannya dilaksanakan oleh manusia”. Hal ini membuktikan bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang mendorong sumber lainnya bekerja dan berakibat langsung terhadap kesejahteraan organisasi. Oleh sebab itu sebaik apapun sistem apabila tidak dijunjung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai maka akan sia-sia.

Menurut (Karinda, 2018), bahwa sumber daya manusia memiliki indikator terdiri dari: kejelasan aparatur pelayanan, kedisiplinan aparatur pelayanan, tanggung jawab aparatur pelayanan, kemampuan aparatur pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan aparatur. Sumber Daya Manusia mempunyai makna yakni potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik. potensi fisik adalah kemampuan fisik yang terakumulasi pada seseorang pegawai, sedangkan potensi non fisik adalah kemampuan seseorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengetahuan, intelegensia, keahlian, keterampilan, *human relation*. Lebih lanjut, Wardani *at al* (2017), menjelaskan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Selanjutnya permasalahan yang terjadi adalah kualitas SDM di beberapa pemerintahan desa khususnya di kecamatan Dusun Timur masih sangat kurang. hal

ini ditunjukkan dari beberapa kasus korupsi dana desa serta adanya dugaan penyelewengan dana desa di beberapa desa di kecamatan Dusun Timur. Beberapa contoh kasus korupsi dan penyelewengan dana desa diantaranya yaitu, kasus korupsi dan penyelewengan dana desa diantaranya yaitu kasus Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015 yang dilakukan oleh dua mantan Kepala Desa Desa Sumur dan Desa Kambitin Kecamatan Dusun Timur yang berinisial YS dan DM. Kerugian negara atas kasus korupsi dana desa itu sebesar Rp. 600 juta dan uang tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, tersangka diduga telah melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999, Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Antarane.ws.com 2021).

Fenomena tentang kasus korupsi dana desa serta adanya dugaan penyelewengan dana desa di beberapa desa di kecamatan dusun timur menunjukkan kualitas SDM yang masih kurang terkait kinerja pemerinta desa. Kepala desa selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa dituntut agar lebih transparan, kompeten ,dan akuntabel dalam mengelola dana desa. Terlebih lagi kemampuan sebagian besar SDM yang mengelola keuangan desa dan yang mengawasi juga diragukan dan menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik kepala desa dan perangkat desa yang terkait, dengan sistem pelaporan keuangan harus memiliki SDM yang berkualitas.

Menurut SDM yang berkualitas tersebut harus didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. SDM yang berkualitas dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena SDM tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan oleh sebab itu diperlukan adanya pengomptimalisasian SDM dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya.

Dapat dilihat dari kualitas SDM desa yang kurang tanpa adanya kompetensi di bidang akuntansi dalam menjalankan tugasnya membuat banyak pihak yang meragukan proses pertanggungjawaban pengelolaan dana

desa”. Hal ini menyebabkan informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan..Maka diperlukan adanya mengoptimalkan SDM dengan penempatan pegawai.,yang sesuai dengan kompetensinya.

Menurut Munti *at al* (2018), menyimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Lebih lanjut hasil penelitian Rulyanti *at al* (2018), menyimpulkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dan kinerja pemerintah desa. Hasil penelitian Wardani *at al* (2017), menyimpulkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa. Dari beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas SDM merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintahan desa. Kemudian hasil penelitian menyimpulkan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa (Fitria, 2019).

Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi terhadap kinerja pemerintah desa adalah Pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi berkaitan dengan komputer, perangkat, jaringan seperti internet, teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer diperuntukkan dalam pemrosesan dan penyimpanan informasi, berfungsi sebagai media teknologi komunikasi.

Menurut (Tarjo, 2020), menjelaskan bahwa aktivitas di desa yang semakin banyak, tidak mungkin untuk dilakukan secara manual, oleh karena itu perlu didukung adanya teknologi dan sekaligus pemanfaatannya agar kinerja maksimal. Memaksimalkan suatu pekerjaan akan terlihat dari keakuratan dan ketepatan hanya dapat dicapai dengan bantuan teknologi. Operasional perkantoran dan pelaporan keuangan yang andal membutuhkan penggunaan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi meliputi (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem administrasi dan proses kerja elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat. Berdasarkan pemaparan diatas terlihat bahwa penggunaan teknologi

informasi berupa komputer membantu kinerja aparatur desa dalam mengelola arsip desa secara menyeluruh.

Dalam rangka mendukung adanya penanganan data secara lebih cepat, efektif, efisien, serta mewujudkan akuntabilitas, dan keterbukaan dalam organisasi pemerintahan, penggunaan teknologi informasi adalah suatu kebutuhan yang harus diperhatikan. Kinerja dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi secara efektif. Menurut Nurillah (2014), berorientasi pada tercapainya manajemen keuangan yang efisien, akuntabel, efektif, dan efisien baik di lingkup publik maupun komersial, harus menggunakan teknologi informasi sebagai penunjang operasionalnya. Tingkat keahlian sumber daya manusia juga harus mendukung dalam penggunaan teknologi informasi ini. Selain itu pula, dalam pengelolaan anggaran desa memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya (Raharja, 2020). Sistem perangkat lunak yang dikembangkan guna mendukung pendistribusian data dan informasi seperti sistem pengoprasian komputer, (Lubis, 2020).

Hasil penelitian Lubis (2020), menyimpulkan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. kemudian penelitian yang dilakukan Lestari *at al*, (2020), menyimpulkan Kemampuan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian selanjutnya oleh Tarjo (2020), menyimpulkan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa.

Selain faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa, faktor transparansi pengelolaan dana desa juga merupakan faktor yang menentukan kegiatan organisasi berjalan secara lebih efektif dan efisien. Keterbukaan pemerintah dalam membagi informasi tentang tindakan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi itulah yang dimaksud dengan transparansi. Garung *at al* (2018) menjelaskan bahwa transparansi adalah akses dan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung

dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah. Banyak penelitian dan pendapat yang mengatakan bahwa terdapat kaitan penerapan transparansi dalam meningkatkan kinerja pemerintah baik antara lain.

Syawaluddin *at al* (2023), Transparansi adalah keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat tentang informasi publik yang seharusnya dapat diakses dengan mudah. Penerapan asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memberikan kesempatan daerah secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif. Perwujudan transparansi sebagai amanat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pemerintahan telah memberikan tekanan kepada aparaturnya untuk membuka diri terhadap hak masyarakat. Karawaheni *at al* (2020), menyatakan bahwa prinsip transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi konsep *good governance*, melalui informasi yang transparan, dan mudah diakses akan memudahkan untuk publik memahami dan berpartisipasi secara nyata dalam proses-proses yang berkepentingan dengan publik.

M. Amin (2019), juga menyimpulkan bahwa kinerja aparaturnya dan pengawasan BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan transparansi pengelolaan dana desa merupakan faktor penting untuk mencapai keberhasilan dari kinerja pemerintah desa. Untuk itu diperlukan pengukuran kinerja pemerintah desa yang dapat dilihat dari predikat yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tingkat keberhasilan atau kegagalan dari kinerja pemerintah dapat dinilai melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Penilaian tersebut diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Hasil penelitian dari ketiga faktor tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Peneliti pertama (Karinda, 2018) menunjukkan bahwa bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya, penelitian kedua diperoleh (Lubis, 2020), menunjukkan Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil penelitian ketiga (M.Amin,20), menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa di desa Poemancang.

Peneliti termotivasi untuk menguji kembali penelitian terdahulu dengan menggabungkan beberapa variabel yang sebelumnya telah diteliti secara terpisah, yaitu sumber daya manusia pada penelitian (Karinda, 2018), Pemanfaatan teknologi pada penelitian (Lubis, 2020) dan Transparansi pengelolaan dana desa pada penelitian (M. Amin, 2020). Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang didapatkan semuanya berfokus pada kinerja pemerintah desa. Sehingga menjadi pertimbangan peneliti untuk memilih kinerja pemerintah desa sebagai variabel dependen yang nantinya diukur menggunakan penelitian (Lubis, 2020). Selain itu penelitian dengan menggabungkan ketiga variabel independen diatas belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Sehingga dengan adanya penggabungan variabel-variabel independen tersebut dapat memperbaiki riset-riset yang sebelumnya pernah ada.

Peneliti tertarik untuk menggunakan Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur sebagai subjek penelitian, karena dari masalah-masalah yang tertera di atas menunjukkan bahwa aparatur pemerintah desa Kecamatan Dusun Timur masih kurang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Peneliti juga ingin membuktikan apakah yang dikatakan oleh masyarakat setempat itu benar adanya, atau justru menyimpang dari kenyataannya, karena opini atau pendapat seperti itu juga dapat merugikan pemerintah, serta merusak citra pemerintahan di kabupaten tersebut. Selain itu alasan pemilihan subjek penelitian ini karena penelitian dengan judul yang sama belum pernah dilakukan. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mengangkat judul: **“PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,**

PEMANFAATAN TEKNOLOGI, DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KINERJA APARATUR DESA DI KABUPATEN BARITO TIMUR.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah desa di Kecamatan Dusun Timur?
2. Apakah pemanfaatan teknologi mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah desa di Kecamatan Dusun Timur?
3. Apakah Transparansi dana desa mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah desa di Kecamatan Dusun Timur?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan agar pembahasan dalam penelitian tidak menyimpang dari fenomena yang diteliti, sehingga penelitian mampu dimengerti. Untuk menghindari terjadinya hal yang menyimpang dalam penelitian, maka perlu ditentukan batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian hanya berfokus pada Pengaruh Kualitas Sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi, dan Transparansi Pengelolaan dana desa terhadap kinerja aparatur desa. Dalam penelitian menggunakan data tahun 2019 dan 2021.
2. Penelitian dilakukan di 1 kecamatan yang ada di kabupaten Barito Timur, karena masalah penyelewengan dana desa yang berpengaruh pula pada kualitas sumber daya manusia yang masih kurang, pemanfaatan teknologi yang belum optimal sebagai penunjang operasional dan kurangnya transparansi laporan pertanggungjawaban dana desa yang lambat diserahkan oleh kepala desa.
3. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada 80 aparatur desa di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah serta menguji kembali variabel yang terdapat dari penelitian sebelumnya tentang kualitas sumber daya manusia pada penelitian (Karinda, 2018) Pemanfaatan teknologi pada penelitian (Lubis, 2020) dan Transparansi pengelolaan dana desa pada penelitian (M.Amin,2019). Sehingga dari penggabungan variabel yang ada menjadikan sebuah teori baru dan penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kinerja pemerintah desa. Subjek yang akan diteliti adalah Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara kualitas SDM, Pemanfaatan teknologi dan, Transparansi pengelolaan Dana Desa terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, serta kontribusi bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan memperkaya wawasan atau masukan tentang apakah terdapat pengaruh dari kualitas sumber daya manusia (SDM) pemanfaatan teknologi dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap aparatur pemerintah desa. Hal ini menjadi sangat penting mengingat telah ada konsep baku yang diharapkan oleh pemerintah dan memahami faktor-faktor dengan hal tersebut adalah suatu keharusan. Ini dimaksudkan agar kita semua dapat memahami secara teoritis hal-hal apa saja yang terkait dengan pengelolaan dan transparansi keuangan dana desa yang saat ini menjadi salah satu alokasi anggaran terbesar yang disalurkan oleh pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur-aparatur desa dan memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan pengelolaan dan transparansi pengelolaan dana desa yang baik yang dilandasi dengan sikap kehati-hatian karena adanya sistem pengawasan yang juga berjalan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat jumlah aparatur desa yang tidak sedikit serta jumlah dana desa yang tidak sedikit sehingga membutuhkan tanggung jawab yang tinggi pula.

